

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SENIN
23 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



**DIDUGA DIBUANG, JANIN BAYI 7 BULAN
DITEMUKAN DI SUNGAI MAHAKAM**

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG





Mayat janin bayi perempuan ditemukan mengambang di sungai Mahakam. (Istimewa)

DIDUGA DIBUANG, JANIN BAYI 7 BULAN DITEMUKAN DI SUNGAI MAHAKAM

SAMARINDA- Janin bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan mengapung tanpa busana di perairan Sungai Mahakam, Taman Depan Islamic Center, Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.

Janin tersebut ditemukan pada pukul 06.00 Wita dengan keadaan meninggal dunia.

Janin bayi malang tersebut belum diketahui identitasnya, memiliki ciri-ciri panjang 24 cm, warna kulit putih, dan diperkirakan berumur sekitar 7 bulan.

Tiga pemuda yang menjadi saksi tersebut di antaranya, Muhammad Renaldi, Lutvi Ahmad Airlangga, dan Andi M. Fahrezi.

Menurut keterangan dari tiga saksi, pada saat olahraga pagi sembari bersantai di Taman Islamic Center melihat diduga mayat

bayi. Saksi-saksi memastikan dengan mengangkat ke turap taman dan dipastikan bahwa benar mayat bayi.

Usai menemukan mayat janin tersebut, saksi langsung melaporkan peristiwa itu ke Pos Patwal Polresta Samarinda, Polsek Sungai Kunjang dan Babinsa.

Personil Polsek Sungai Kunjang dan Babinsa langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melakukan evakuasi penemuan mayat untuk dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk dilakukan visum repertum.

Tepat pukul 07.40 Wita, mayat janin tersebut dibawa oleh Tim Inafis Polresta dan Personil Polsek Sungai Kunjang menggunakan Ambulans menuju RSUD AWS.

Pewartu : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Purwadi Purwoharsojo, Akademisi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman

NEGARA LAIN 'KUASAI' PASOKAN PANGAN, EKONOM UNMUL KRITIK IMPOR BERAS

SAMARINDA - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2023, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 1,79 juta ton. Data impor beras BPS ini mencakup berbagai jenis beras, termasuk beras khusus, premium, medium, konsumsi, dan beras pecah.

Negara asal impor terbesar adalah Thailand, dengan pangsa impor sebesar 50,36%, yang setara dengan separuh dari total impor beras. Vietnam menduduki urutan kedua dengan porsi sebesar 42,33%.

Pemerintah telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor beras konsumsi guna mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang terus menyusut sejak akhir kuartal tahun 2022. Pada saat yang sama, harga beras terus meningkat sejak Agustus 2022 dan diprediksi akan terus naik bahkan hingga akhir tahun.

Akademisi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengkritik upaya pemerintah dalam mengamankan pasokan beras dengan mengandalkan impor.

"Pemerintah tidak konsisten antara visi dan implementasi. Indonesia disebut negara agraris, tetapi hampir semua kebutuhan pangan dasar kita harus diimpor," kata Purwadi.

Belakangan ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terseret dalam dugaan kasus korupsi, yang menurut Purwadi semakin memengaruhi sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Selain beras, berbagai kebutuhan pangan lainnya, seperti gula, kedelai, bahkan

garam, juga harus diimpor.

"Angka impor bahan pangan kita tinggi, tidak hanya beras, contohnya garam, padahal kita punya banyak laut. Gula juga diimpor, sedangkan pabrik gula banyak yang tutup," ungkap Purwadi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan CBP dapat bertambah sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir 2023, dengan alasan dampak fenomena El Nino.

Lebih lanjut, Purwadi menambahkan bahwa jika solusi untuk ketersediaan pangan hanya melalui impor, ini akan berdampak pada inflasi dan akan mempengaruhi masyarakat menengah ke bawah.

"Makin banyak impor, maka nilai tukar rupiah akan semakin tergerus. Nilai tukar rupiah kita pada hari ini (20/10/2023) mencapai Rp 15.800, hampir mencapai Rp 16.000. Jika impor terus meningkat, petani akan menderita karena tidak mampu bersaing," ujarnya.

Purwadi mendesak pemerintah dan Bulog untuk lebih serius dalam mengatasi ketahanan pangan dan memperhatikan kesejahteraan petani, serta berusaha meningkatkan minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor pertanian.

"Jangan hanya menyalahkan El Nino; pemerintah seharusnya memiliki strategi manajemen krisis yang efektif. Di samping itu, jumlah petani muda terus menurun sejak 2020. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani," tambahnya (dsy).

Pewarta: Desy Alvionita



Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud

IKN DI KALTIM, GENERASI MUDA DIMINTA TINGKATKAN KUALITAS SDM

SAMARINDA - Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur diharapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas'ud menjadi momentum penyerapan tenaga kerja di Kaltim.

Dengan semakin luasnya lapangan kerja, masyarakat Kaltim khususnya generasi muda diharapkan meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya agar mampu berdaya saing.

"Hadirnya IKN harus didukung, kendati demikian semua warga Kaltim khususnya generasi muda harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar memiliki SDM yang berkualitas," terangnya.

Politisi Golkar ini menerangkan,

peningkatan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut dapat dilakukan di pendidikan formal dan informal. Sehingga Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan juga melakukan pembenahan.

Selain itu pembekalan, bimbingan dan pelatihan juga harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas generasi muda di Kaltim. Apalagi diprediksi akan ada urbanisasi besar ke Kaltim dengan adanya IKN.

"Persaingan dunia kerja kedepannya tentu akan ketat, karena banyaknya penduduk yang pindah ke IKN. Sudah siap kah kita ? Untuk itu harus kita persiapkan sekarang," pungkasnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim, Dapil Bontang, Kutim, Berau, M. Udin

LEGISLATOR GOLKAR INI SOROTI SERAPAN NAKER DI BONTANG DAN KUTIM

SAMARINDA - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), M. Udin menyampaikan masukan terhadap Kota Bontang dan Kabupaten Kutim yang belum lama ini merayakan hari jadinya.

Politisi Golkar ini menyebut sebagai Kota Industri yang maju dan modern, masih banyak aspirasi yang diterimanya terkait minimnya lapangan pekerjaan. Ia mengaku sejumlah masyarakat keluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di Kota Bontang.

"Kami berharap Pemerintah Kota Bontang memberikan alternatif dan pelatihan untuk anak muda mereka agar tidak hanya mengandalkan dua perusahaan itu, tetapi juga menjadi wirausahawan," ujarnya.

M. Udin juga menyorot berdirinya pabrik semen dan pabrik pengolahan metanol di Kabupaten Kutim. Ia menilai bahwa adanya pabrik-pabrik tersebut akab membuat lapangan

kerja di Kutim semakin luas.

Kendati demikian ia mendorong agar perusahaan di sana, dapat memberdayakan tenaga kerja asli Kutim agar dampak positifnya dapat dirasakan masyarakat Kutim. Jangan sampai menurutnya, kejadian sebuah pabrik merekrut Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Kami berharap tenaga kerja asing itu hanya sementara dan sebagian besar adalah tenaga lokal. Kami minta agar pekerja lokal yang ada di Kalimantan Timur diutamakan dan dilindungi oleh pemerintah daerah," tegas Anggota DPRD Kaltim Dapil Bontang, Kutim, Berau tersebut.

"Dan juga harapan kami pemerintah daerah memberikan edukasi dan skill kepada masyarakat kita agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing, terutama dari China," pungkasnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sutomo Jabir

SUTOMO JABIR SEBUT ADA 10 DESA DI KUTIM BELUM TERALIRI LISTRIK

SAMARINDA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sutomo Jabir, mengungkapkan ada puluhan desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang tak teraliri listrik.

Ia mengatakan, bahwa penyebab desa-desa tersebut tak dapat menikmati listrik, karena terkendala wilayah izin salah satu perusahaan pelistrikan, sehingga PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak dapat menjangkaunya.

Untuk itu Politisi PKB ini, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk mendudukan masalah dan mendarikan solusinya. Sebab, listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

"Perlu ditengahi antara perusahaan dan PLN, karena PLN telah menyanggupi untuk bisa mengakomodir kebutuhan listrik di daerah sana, sementara itu tidak bisa masuk karena masih masuk dalam wilayah izin perusahaan,"

tegasnya.

Ia membeberkan bahwa desa yang dimaksud berada di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran. Dari dua kecamatan ini, sebutnya, ada 10 desa dengan ratusan warga, yang tidak teraliri listrik.

"Apalagi banyak nelayan, mereka juga pasti membutuhkn es batu, bagaimana bisa es batu mereka buat kalau aliran listriknya tidak ada, jadi ini betul-betul kebutuhan dasar masyarakat kita yang perlu diperhatikan," jelasnya kepada awak media.

Sutomo Jabir lebih lanjut mengatakan, desa-desa yang ada di Kutim hanya sebagian dari desa yang belum teraliri listrik. Ia menyatakan, berdasar data dari PT PLN dari 1038 desa di Kaltim, hanya 839 desa yang dapat teraliri listrik. Artinya ada 199 desa yang belum menikmati aliran listrik dan menjadi tugas untuk segera dituntaskan. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati

PENEMPATAN GURU PPPK TIDAK SESUAI KEBUTUHAN SEKOLAH, KOMISI IV HARAP ADA SOLUSI YANG ADIL

SAMARINDA - Penempatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos passing grade pada tahun 2021 ditemukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing sekolah. Hal demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Puji Setyowati.

Puji mengatakan Komisi IV telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim dan Badan Kepegawaian Daerah Kaltim belum lama ini, membahas persoalan penempatan guru PPPK.

Ia membeberkan permasalahan penempatan yang dimaksud yakni adanya guru yang ditempatkan di sekolah yang sudah memiliki guru mata pelajaran yang sama, atau adanya guru yang ditempatkan di daerah yang jauh dari tempat tinggal atau tempat mengajar sebelumnya. "Ada beberapa masalah yang ditemukan terkait penempatan guru PPPK. Kami ingin tahu kesalahannya di mana, apakah di sistem ap-

likasi pendaftaran atau ada faktor lain yang mempengaruhi," terangnya.

Sebagai contoh, lanjutnya, ada sekolah yang membutuhkan guru bahasa Inggris, namun guru PPPK yang ditempatkan di sekolah tersebut justru guru matematika yang notabene sekolah tersebut telah memiliki guru matematika.

"Oleh karena itu, kami bersama Disdikbud dan BKD mencari solusi. Tapi solusi yang kami cari tidak boleh keluar dari regulasi yang ada, karena ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh guru PPPK," bebernya.

Politisi Demokrat ini berharap polemik penempatan guru PPPK ini dapat selesai dengan solusi yang tidak mengorbankan salah satu pihak semata. Yang jelas menurutnya, upaya Pemprov Kaltim saat kepemimpinan Isran - Hadi yang memperjuangkan nasib pegawai non ASN patut diapresiasi. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



PT Bank Kaltimtar

BANK KALTIMTARA KEMBALI DAPAT PENYERTAAN MODAL, DPRD HARAP KONTRIBUSI PENDAPATAN LEBIH BESAR

SAMARINDA - Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bankaltimtara kembali mendapatkan penambahan modal sebesar Rp3,5 triliun.

Tambahan penyertaan modal tersebut menjadikan Pemprov Kaltim sebagai pemegang saham terbesar yakni 51 persen di Bankaltimtara.

Dengan adanya penyertaan modal ini Bankaltimtara masuk dalam klasifikasi bank buku dua, yang mengharus-

kan mereka untuk memiliki daya saing dalam industri perbankan.

Penambahan modal ini, diharapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, memicu Bank Kaltimtara meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta terus berinovasi agar dapat berdaya saing dengan bank konvensional lainnya.

"Kebutuhan Bankaltimtara senilai Rp3,5 triliun bisa kita penuhi dan kita harus bersama-sama memantau peng-

gunaan anggaran yang kita berikan," jelasnya.

Seno Aji lebih lanjut mengutarakan, DPRD Kaltim berharap tambahan modal ini juga dapat berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pembagian dividennya.

"Kita inginkan tentunya penambahan ini bisa mendatangkan dividen dalam jumlah besar bagi Kaltim," pungkasnya. **(Eky/Adv/DPRD Kaltim)**

**Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari**



POLRESTA SAMARINDA KEMBALI AMANKAN PENGGUNA NARKOBA

SAMARINDA - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan menangkap satu orang pelaku di Jalan Dr. Sutomo Gg.11 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sekitar Pukul 21.15 Wita.

Adapun kronologisnya, pada hari Senin (16/10/2023) pelapor dan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Sutomo Gg.11 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.

Kemudian, pelapor dan saksi melakukan observasi dengan cermat. Sekitar pukul 21.15 Wita, pelapor dan saksi mencurigai seorang laki-laki yang baru saja masuk ke dalam gang menggunakan sepeda motor seorang diri.

Setelah laki-laki tersebut berhenti berkendara, dilaku-

kan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang berinisial AW dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak freshcare warna merah di dashboard motor sebelah kiri yang sebelumnya dikendarai oleh AW. Kotak freshcare tersebut berisikan 1 poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 5,05 gram yang dibalut tissue dan terbungkus dalam plastik klip.

Kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 6 poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,45 gram yang tersimpan di dompet kecil warna hitam merk Marvel. Dompet tersebut ada di dalam tas selempang warna hitam merk NOFEAR yang dikenakan oleh AW beserta barang bukti lainnya.

Setelah itu, pihak Polresta Samarinda juga melakukan penggeledahan pada kamar nomor 216 di salah satu Guest House yang di Jalan A. Yani yang sebelumnya disewa oleh AW yang beralamat di Jalan Achmad

Yani, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Ditemukan barang bukti berupa 1 buah kantung kain warna orange yang bertuliskan Celcius yang ditunjukkan langsung oleh AW di bawah ranjang. Di dalamnya berisikan 1 poket/bungkus sabu seberat 5,48 gram yang tersimpan lagi di dompet kecil warna cokelat motif jerapah, dan 30 poket/bungkus sabu seberat 12,14 gram yang terbungkus di dalam 1 lembar plastik klip.

Selanjutnya pelaku AW beserta barang buktinya diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) sub-sider pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Deluxe Room

ONLY

Rp 698.000,-

30% OFF

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

- Breakfast** 2 pax
- FREE Laundry** Up To 2 pcs
- FREE Kopi Inspirasi** Buy 3, Pay 2
- FREE Afternoon Tea**
- FREE Mini Mantou** 5 pcs

➔ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



PJ BUPATI MAKMUR MARBUN PIMPIN PUNCAK RITUAL FESTIVAL NONDOI DENGAN KESULTANAN PASER



**SERIUSI PEMBANGUNAN TOL LAUT,
MAKMUR MARBUN KOORDINASI
KE KEMENKO MARVES**



Rangkaian penutupan Festival Nondoï 2023, Sabtu (21/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PJ BUPATI MAKMUR MARBUN PIMPIN PUNCAK RITUAL FESTIVAL NONDOI DENGAN KESULTANAN PASER

PPU - Festival Nondoï Pe-najam Paser Utara (PPU) 2023 berakhir, Sabtu (21/10/2023). Sekkab PPU, Tohar hadir mewakili pemerintah daerah menutup secara resmi pagelaran budaya tahunan itu.

Festival ini diselenggarakan selama empat hari, yang di mulai pada tanggal 18 hingga 21 Oktober 2023, bertempat di Rumah Adat Kuta Rekan Tatau. Tohar dalam kesempatan itu memberikan apresiasi dan penghargaan pada seluruh pihak yang telah terlibat langsung sehingga acara ini terlaksana dengan lancar hingga akhir.

"Untuk itu sekali lagi atas nama pimpinan dan Pemerintah Kabupaten PPU men-

yampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya," ujarnya.

Ada beberapa komponen terkait dengan penyelenggaraan Festival Nondoï ini. Leading sektor dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Lembaga Adat Paser (LAP) PPU, juga pramu seni dan budaya di PPU. Kemudian pramu kuliner dan pelaku usaha UMKM dan lainnya membuat festival tahun ini lebih semarak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Sebagai evaluasi pelaksanaan tahun ini untuk dilakukan proyeksi perbaikan pada tahun yang akan datang. Sehingga pelaksanaan Nondoï

ini dari tahun Ketahun mesti harus ada perbaikan," jelas Tohar.

Sementara puncak prosesi ritual Festival Nondoï Pj Bupati Makmur Marbun hadir dengan membawa tombak Kesultanan Paser. Ia juga memimpin pelepasan Larung Jakit yang di ikuti oleh seluruh tokoh adat Kalimantan Timur.

Penutupan Festival Nondoï dihadiri oleh anggota DPRD PPU, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, Kepala Besar Dayak Kenyah Kalimantan Timur, tokoh adat Paser dari Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan serta masyarakat PPU. **(ADV/SBK)**



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat berbincang dengan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmad Kaimuddin di Jakarta, Jumat malam (20/10/2023). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)

SERIOUS PEMBANGUNAN TOL LAUT, MAKMUR MARBUN KOORDINASI KE KEMENKO MARVES

PPU - Keinginan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun terkait adanya tol laut di wilayahnya terus diupayakan. Terbaru, ia langsung menggelar pertemuan dan koordinasi secara intensif ke Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Jumat (20/10/2023).

Saat itu Makmur bertemu langsung dengan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmad Kaimuddin di Jakarta. Di sana, ia memaparkan kebutuhan daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) itu guna mempermudah akses masuknya barang dan logistik.

"Salah satu alasan pembangunan tol laut PPU adalah mempermudah akses masuknya barang dan logistik serta menekan harga komoditi pangan di PPU agar tersedia dengan harga terjangkau," jelasnya.

Hal ini dilakukan demi menjaga laju inflasi yang diakibatkan peningkatan demografi penduduk. Serta meningkatnya kebutuhan pangan khususnya di wilayah PPU dan kawasan sekitar IKN.

Sebagaimana diketahui, Pemkab PPU memiliki Pelabuhan Buluminung di Keca-

matan Penajam. Dengan terwujudnya tol laut itu, pengiriman barang langsung dari daerah pengiriman dan bisa tiba dipelabuhan PPU, tanpa perlu transit di Balikpapan.

Selama ini, barang, logistik atau pangan yang masuk ke PPU berasal dari luar daerah seperti Surabaya dan Sulawesi, kemudian diturunkan dulu di Balikpapan lalu dari Balikpapan akan tersebar di beberapa pelabuhan, untuk selanjutnya diangkut ke PPU.

"Proses pengiriman barang dan pendistribusian inilah yang memicu harga barang yang masuk ke PPU menjadi lebih mahal, karena ongkos distribusinya belum lagi waktu yang lebih lama sehingga mengakibatkan ketersediaan bahan pokok tidak bisa dikendalikan," jelas Makmur.

Tol laut ini juga dinilai mampu membantu peningkatan perekonomian daerah. Utamanya menambah volume bongkar muat hasil pertanian dan perikanan PPU ke Balikpapan dan Samarinda.

"Makanya rencana pembangunan tol laut ini langsung saya sampaikan kepada pak Deputy di Jakarta, kami berharap agar kami dibantu dan dapat segera terealisasi," pungkasnya. **(ADV/SBK)**



Pj Bupati PPU Makmur Marbun bersama Asisten II Setkab PPU, Nicko Herlambang saat meninjau Pelabuhan Buluminung Beberapa waktu lalu. (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU RENCANA PEMBUATAN TOL LAUT, STRATEGI DEKATKAN JALUR DISTRIBUSI

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) rencanakan adanya tol laut sebagai jalur logistik daerah. Ini merupakan strategi baru yang digaungkan Pj Bupati PPU, Makmur Marbun untuk memperlancar distribusi barang ke Benua Taka, bahkan ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Tol laut dimaksudkan agar barang-barang yang masuk ke langsung dari daerah pengiriman. Tanpa perlu transit di Balikpapan seperti yang selama ini terjadi.

“Rencana tol laut itu bagian dari strategi besar kita untuk merubah akses logistik,” ungkap Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang, Sabtu (21/10/2023).

Kondisi itulah yang membuat harga barang di pasaran PPU menjadi lebih mahal. Karena memang ongkos distribusinya yang lebih tinggi.

Nicko menjelaskan bahwa, harusnya ada akses langsung yang menghubungkan PPU dengan daerah pemasok seperti Surabaya dan Sulawesi. Sementara ini, di Kalimantan hanya ada dari Kalimantan Utara (Kaltara)

sampai ke Kota Balikpapan saja

Selain itu, tol laut ini menjadi yang diharapkan bagi optimalnya Pelabuhan Buluminung. Sebab, pelabuhan milik Pemkab PPU ini dinilai mumpuni jadi tempat sandarnya kapal barang tersebut.

“Dengan adanya benefit ini, barang juga bisa langsung ke IKN tanpa melalui jalan nasional yang sekarang,” sambungnya.

Akses tol laut dianggap penting, terlebih saat pendaratan ke IKN yang semakin banyak. Secara otomatis pula berdampak pada kebutuhan berbagai barang di PPU.

Adapun usulan tol laut ini telah disampaikan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Pun telah dilakukan pembahasan dengan para pedagang, terkait barang yang dibutuhkan dari luar daerah, dan pengirimannya nanti yang akan melalui akses tol laut.

“Kelancaran distribusi diharapkan menjadi salah satu faktor, yang bisa mengurangi harga barang yang ada di PPU dan IKN,” pungkas Nicko. **(ADV/SBK)**



Ketua Forum UMKM Mitra PT Kideco, Arbani (Deddy/Radarmedia)

FORUM UMKM PASER TURUT MERIAHKAN FESTIVAL NONDOI DI PPU

PPU - Festival adat suku Paser, Nondoi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) turut di-meriahkan berbagai kalangan termasuk pelaku usaha dari berbagai daerah. Acara yang digelar selama 4 hari sejak 18 - 21 Oktober 2023 itu, kini memasuki puncak rangkaian acara.

Ritual yang dimaknai sebagai bersih-bersih kampung itu, bukan sekadar tradisi. Melainkan momentum untuk menghadirkan kreativitas dan kearifan lokal. Pesertanya pun bukan hanya dari PPU, tapi juga dari suku dan daerah lainnya.

Salah satunya dari Kabupaten Paser sendiri yakni Forum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mitra PT Kideco Jaya Agung, yang ikut berpartisipasi pada agenda tahunan bertema "Serapo Nusantara" itu di Rumah Adat Kuta Rekan Tatau.

Ketua Forum UMKM Mitra PT Kideco Jaya Agung, Arbani mengatakan, sangat bangga dan senang dapat ikut serta memeriahkan acara tersebut. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung kegiatan promosi produk lokal tersebut.

"Hadirnya kami di sini tidak luput pula atas support dan dukungan dari mitra kami yaitu PT. Kideco," ujarnya, Sabtu (21/10/2023).

Lanjutnya, adapun beberapa produk yang dipasarkan berbagai macam produk kuliner lokal Kalimantan. Di antaranya, seperti Gula Aren Paser, Kopi Uko, Esa Masin, aneka kripik, bakpia, donat, bolen, lemang dan minuman herbal seperti bawang Dayak serta madu dan lainnya.

"Acara seperti ini sangatlah membantu dalam mempromosikan produk UMKM yang tadinya tidak diketahui menjadi dikenal" ungkapnya.

Harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilakukan di berbagai tempat lainnya, agar produk lokal kita dapat lebih dikenal lagi bukan hanya di Kalimantan saja bahkan luar Kalimantan.

"Pastinya kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut untuk mempromosikan produk lokal sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah, mengingat kita sebagai tuan rumah IKN," tutupnya.

Pewarta : Deddy
Editor : Nicha Ratnasari



Asisten I Setkab PPU saat mengadiri pelantikan pengurus IKAT periode 2023-2028. (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU SAMBUT PENGURUS BARU IKAT PERIODE 2023-2028

PPU - Pelantikan dan pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Penajam Paser Utara (PPU) masa bakti 2023-2028 digelar Sabtu (21/10/2023). Pemkab PPU berharap kehadiran pengurus baru ini dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dengan program pemerintah.

Gelaran acara dilaksanakan di Gedung Pertemuan RSUD Ratu Aji Putri Botung dan dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU Sodikin. Turut hadir mantan Bupati PPU Hamdam dan perwakilan Forkopimda PPU dan organisasi adat/paguyuban, tokoh agama serta seluruh warga IKAT PPU.

Sodikin menyampaikan menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi kepada para inisiator. Sehingga kepengurusan IKAT ini telah memasuki masa kepengurusan periode yang ke-4.

"Pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, pembentukan organisasi IKAT Kabupaten PPU ini memiliki makna yang penting dan strategis," ucapnya.

Organisasi ini, sambungnya, hendaknya

jangan berhenti hanya sampai pada pembentukan dan pergantian pengurusnya saja. Namun dapat lebih jauh dari itu.

"Saya berharap, kiranya dapat memberikan makna dan kontribusi yang berarti terhadap keselarasan program pembangunan di daerah ini, terutama dalam pembangunan dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan," jelas Sodikin.

Diharapkan juga agar segera membuahkannya dan memberikan warna terbaiknya bagi perkembangan sosial kemasyarakatan dan pembangunan di Benuo Taka. Oleh karena itu, kehadirannya ke depan dapat menyinergikan secara langsung dengan program yang dilaksanakan pemerintah daerah.

"Sekali lagi selamat atas pelantikan pengurus IKAT Cabang PPU, semoga pengurus baru dapat membawa komunitas ini menuju prestasi yang lebih besar, serta terus memajukan budaya dan solidaritas sosial. Selamat berkontribusi positif bagi masyarakat di daerah ini," tutup Sodikin. (ADV/SBK)



Pelatihan dilaksanakan di aula Penginapan Pantai Amal Penajam, Sabtu (21/10/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK, DPMPTSP PPU GELAR SERTIFIKASI PETUGAS LAYANAN

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU menggelar pelatihan pelayanan prima. Dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan ke masyarakat.

Pelatihan itu bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim. Dalam pelatihan ini, pegawai DPMPTSP PPU juga menerima Sertifikasi Petugas Layanan.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua hari tanggal 21-22 Oktober 2023. Dikuti oleh 42 orang pegawai DPMPTSP PPU serta menghadirkan narasumber Widyaiswara BPSDM Kaltim Hernawati.

Kepala DPMPTSP PPU Hadi Saputro menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya pihaknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan publik yang terstandar. Khususnya pada DPMPTSP yang memberikan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan serta mendorong investor untuk berinvestasi di PPU.

"Kegiatan pelatihan ini menjadi titik awal dalam meningkatkan pelayanan prima di PPU, terutama dalam pengurusan di bidang perizinan dan non-perizinan serta men-

dorong investor untuk berinvestasi di PPU," ungkapnya, Sabtu (21/10/2023).

Menurutnya, pelatihan ini sangat penting bagi pegawainya. Mengingat pegawai khususnya staf di bagian pelayanan belum mendapatkan pelatihan dalam memberikan layanan terpadu kepada masyarakat.

"Hal ini dikaitkan dengan penilaian dari Ombudsman dan BKPM pelatihan ini perlu dilakukan," sebutnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU, Ahmad Usman memberikan apresiasi dan atas terselenggaranya pelatihan ini. Langkah ini diyakini akan memberikan pemahaman kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi di lingkup DPMPTSP PPU.

Kemudian, disampaikan pula bahwa dengan program city branding "Serambi Nusantara" juga berkaitan dengan ini. Sebagai daerah yang menjadi pintu masuk Ibu Kota Nusantara (IKN), seluruh stakeholder yang menangani pelayanan publik, perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan.

"Di mana salah satu indikator kualitas pelayanan publik adalah kualitas aparatur pelaksana yang menangani pelayanan publik khususnya sektor pelayanan perizinan dan non perizinan," pungkasnya. **(ADV/SBK)**



DIKUTI RATUSAN PELARI, BUPATI KUKAR BUKA KOTA RAJA RUN 2



**PERINGATI HARI SANTRI NASIONAL 2023,
RATUSAN PONPES IKUTI AGENDA KEMAH SANTRI**



Bupati Kukar, Edi Damansyah, saat membuka lomba lari Kota Raja Run 2 tahun 2023. (Istimewa)

DIKUTI RATUSAN PELARI, BUPATI KUKAR BUKA KOTA RAJA RUN 2

TENGGARONG - Kibasan bendera start dari Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menjadi penanda dimulainya Kota Raja Run 2 tahun 2023. Para peserta mulai berlari dari garis start yang terpusat di Taman Kota Raja (TKR) pada minggu pagi (22/10/2023).

Event Kota Raja Run 2 kali ini, mengadakan lari maraton dengan dua nomor lari yang berbeda. Yakni lari maraton dengan jarak 5 kilometer (km) dan 10 km. Ratusan peserta nampak mengikuti lomba lari maraton ini dengan penuh semangat.

Dalam sambutannya, Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan kegiatan ini merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, melalui Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kukar untuk melakukan pembinaan disektor atletik.

"Ini merupakan salah satu bentuk pembinaan dibidang olahraga yang coba terus untuk kita lakukan. Kita beri ruang bagi para atlet untuk unjuk kemampuan di ajang ini, supaya lebih giat lagi berlatih," kata Edi.

Ia juga menambahkan, kegiatan ini juga

ditujukan untuk mencari dan memberikan ruang, bagi para atlet-atlet muda berbakat di Kukar. Khususnya bagi mereka yang menekuni bidang olahraga lari maraton. Di-harapkan, melalui lomba ini nantinya akan melahirkan atlet-atlet lari berbakat, yang bisa mengharumkan nama Kukar maupun Kalimantan Timur (Kaltim).

"Selamat menikmati kegiatan ini, semoga lancar dan mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT," katanya.

Sementara itu, Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengatakan kegiatan ini bukanlah satu-satunya lomba lari yang akan digelar di Kukar pada tahun ini. Ia mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan lomba lari maraton dengan kaliber lebih besar. Dispora Kukar berencana menyelenggarakan lomba lari maraton 10 Km tingkat nasional.

"Kegiatan itu (lomba lari maraton tingkat nasional) merupakan puncak dari berbagai kegiatan olahraga yang telah dilaksanakan oleh Dispora Kukar," pungkasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Edotor : Muhammad Rafi'i



Plt Asisten III Setkab Kukar, Dafip Hariyanto, saat menyampaikan sambutan Bupati Kukar, Edi Damansyah, di acara Kemah Santri 2023. (Istimewa)

Peringati Hari Santri Nasional 2023, Ratusan Ponpes Ikuti Agenda Kemah Santri

TENGGARONG- Memperingati Hari Santri Nasional 2023, ratusan santri dari berbagai pondok pesantren (ponpes) di Kutai Kartanegara (Kukar), berkumpul di Pondok Pesantren Ribathul Khail Timbau Tenggarong. Mereka mengikuti kegiatan kemah santri, yang dirangkai dengan kegiatan Santri Bersholawat. Pada Sabtu (21/10/2023) malam.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Kabupaten (SetKab) Kukar, Dafip Haryanto. Mewakili Bupati Kukar, Edi Damansyah, ini pun menuai apresiasi.

Dafip mengatakan, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik berkat sinergitas yang terjalin dengan baik. Antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, pihak panitia dan juga para ulama, termasuk santri.

"Saya ucapkan terima kasih karena Hari Santri Nasional ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga tahun depan pemda bersama pihak terkait bisa melaksanakan lebih meriah lagi," kata Dafip.

Ia menjelaskan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini. Salah satunya adalah meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia di Kabupaten Kukar.

"Pemerintah daerah dalam visi misi Kukar Idaman terus berupaya meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia, salah satunya memberikan beasiswa bagi santri," tambahnya.

Dafip berharap momentum ini dapat menjadi refleksi bagi para santri untuk terus mempererat persaudaraan dalam keberagaman. Serta terjalin kolaborasi dan sinergitas pemda bersama tokoh agama dan masyarakat.

"Jadikan ajang kemah santri ini untuk membuka wawasan dan pemahaman bagi para santri agar menjauhi faham-faham radikalisme demi menjaga keutuhan NKRI dengan terus memupuk rasa cinta tanah air," pungkasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Rumah pengolahan kakao di Desa Lung Anai. (Istimewa)

Menjanjikan, Komoditas Kakao Mulai Dikembangkan di Desa Lung Anai

TENGGARONG – Memiliki wilayah yang terbilang luas, tentunya menjadi keunggulan sendiri bagi Kutai Kartanegara (Kukar). Dengan kondisi geografis yang sangat luas, sangat memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, untuk mengembangkan sektor pertanian maupun perkebunan.

Dari sektor perkebunan, Kukar memang masih sangat didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Namun bukan berarti, komoditas lain tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satunya yang saat ini sedang coba dikembangkan, yakni komoditas tanaman kakao.

Tanaman ini telah berhasil dibudidayakan di Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu. Bahkan perkebunan tanaman Kakao di Desa Lung Anai, sudah mampu memproduksi coklat.

Atih Hayati, kepala Bidang (kabid) Pemberdayaan Pendayagunaan Sarana Prasarana Sumber Daya Alam dan TTG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar, mengatakan Desa Long Anai memiliki seki-

tar 200 hektare (ha) lahan yang ditanami tanaman Kakao.

Untuk terus mengembang potensi ini, petani di Desa Lung Anai mendapatkan pendampingan dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Serta pemerintah dan pihak swasta mengandeng Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Jember untuk memberikan pelatihan.

“Mereka sudah 2 kali melakukan pelatihan dan saat ini sudah bisa memproduksi coklat batangan yang sudah bisa langsung dikonsumsi,” kata Atih, Minggu (22/10/2023).

Atih menambahkan, para petani Kakao di Desa Lung Anai, telah memiliki rumah produksi coklat. Dengan kapasitas membuat pasta coklat seberat 5 kilogram dalam sekali produksi. “Saat ini kita masih upayakan proses perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Ini masih bertahap dan saat ini masih dalam proses di DPMPSTSP,” pungkasnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



BCC 2023 SUKSES DAN MERIAH, DIHADIRI PANJI PETUALANG DAN HERU 'JEJAK SI GUNDUL'



BACA HALAMAN A2

**Ditangkap di Pinggir Jalan
Pupuk Raya, Pria Asal Guntung
Kedapatan Bawa Sabu 15,37 Gram**





Sambutan Wali Kota Bontang, Basri Rase. (Syakurah/Radarbontang)

BCC 2023 Sukses dan Meriah, Dihadiri Panji Petualang dan Heru 'Jejak Si Gundul'

BONTANG – Event budaya Bontang City Carnival (BCC) 2023 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Sabtu (21/10/23) di Simpang 3 Ramayana berhasil menyita perhatian masyarakat.

Sedari pagi, sebelum acara dimulai warga sudah memenuhi bahu jalan dan tribun-tribun yang disediakan oleh Disdikbud Bontang.

Wali Kota Bontang, Basri Rase dan istri kompak memakai pakaian adat dari Aceh, sementara Wakil Wali Kota Bontang, Najirah menggunakan pakaian adat khas Kutai.

BCC tahun ini juga dihadiri oleh tamu spesial, yakni Panji Petualang dan Heru

'Jejak Si Gundul'. Kedatangan dua bintang tamu itu bertujuan mendongkrak Kota Bontang agar makin dikenal masyarakat luar daerah.

"Sebagai motivasi, agar masyarakat mengetahui objek budaya sebagai destinasi wisata lainnya di Kota Bontang," jelas Basri dalam sambutannya.

Dampak positif lain dalam penyelenggaraan BCC ini dapat membuka peluang pengusaha kecil dan menengah, untuk meningkatkan penghasilannya, khususnya di sektor pariwisata dan sektor lainnya.

Lalu menjadi event atau kegiatan yang ditunggu-tunggu masyarakat Bontang tiap tahunnya, serta dapat menjadi ob-

jek liputan media yang akan membawa nama Bontang di kancah regional dan nasional maupun mancanegara.

"Semua itu pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang, yang otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bontang," imbuhnya.

Sementara itu, Desainer Kostum Karnival sekaligus juri BCC, Suko mengatakan, ada perbedaan penilaian peserta BCC dan pawai budaya. Paramater penilaian untuk BCC di antaranya ialah kreativitas, keunikan, keserasian, dan kesesuaian kostum dengan tema.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva AlamZ



Suasana BCC 2023 di depan Ramayana. (Syakurah/Radarbontang)



Kadisdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono di BCC 2023. (Syakurah/Radar-bontang)

BCC 2023 Berjalan Lancar, Bambang: Ini Sesuai Ekspektasi Saya!

BONTANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang sukses menggelar Event Bontang City Carnival (BCC) 2023, Sabtu (21/10/23). Kegiatan ini diadakan dalam rangka ulang tahun Kota Bontang ke – 24.

Kadisdikbud Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan, BCC kali ini berjalan dengan sangat baik, walaupun sempat molor ketika pembukaan tapi tidak menyurutkan semangat penonton dan para penampil.

Setelah ini, Bambang dan stafnya akan melakukan rapat kembali untuk mengevaluasi gelaran BCC tahun ini, sehingga tahun mendatang akan ada inovasi lagi untuk memanjakan warga Bontang.

“Penampilan hari ini semuanya bagus-bagus, karena tiap tahun kita lak-

sanakan tentu banyak peningkatan,” tegasnya.

Pada pelaksanaan BCC 2023 ini diketahui, jumlah peserta BCC bertambah. Di tahun-tahun sebelumnya 93 grup kini menjadi 95 grup. Hal ini menunjukkan bahwa makin tahun antusias keterlibatan makin meningkat. Penonton dan peserta juga terlihat makin tertib.

“Penonton makin tertib, begitu juga peserta, acara hari ini sesuai dengan ekspektasi saya,” jelasnya.

Pengumuman pemenang akan segera diumumkan, Senin (23/10/23) mendatang, “Semua peserta sudah keren, tapi kita lihat keputusan juri nanti,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang. (Dwi S)

Amir Tosina Apresiasi Penyelenggaraan BCC: Pemkot Luar Biasa!

BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Amir Tosina mengapresiasi gelaran Bontang City Carnival (BCC) 2023 yang diadakan Pemkot Bontang, Sabtu (21/9/2023). Menurutnya, penyelenggaraan event ini luar biasa.

Ketua Komisi III DPRD Bontang itu mengatakan, sebagai anggota DPRD Bontang sudah mengapresiasi pemerintah, apresiasi yang luar biasa. Karena Pemkot Bontang sudah mengadakan BCC sebagai hiburan untuk warga Bontang, khususnya untuk memperingati hari jadi Kota Taman ke-23.

"Apresiasi kepada pemerintah yang sudah melaksanakan acara ini. Intinya, dalam BCC ini banyak berkolaborasi pakaian adat serta

budaya," ucapnya.

Amir juga menambahkan, ia berharap event ini bisa lebih baik lagi untuk Bontang ke depannya. Jika pun masih ada yang kurang, agar bisa dibenahi lagi, agar diperbaiki sama-sama.

"Pokoknya semua sangat luar biasa, semua yang ada di sini. Paling menarik menurut saya adalah adat toraja dan pencak silat dari Tapak Suci," ucapnya.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 3 ribu peserta. Ada 95 kelompok yang mendaftar, 35 untuk carnival dan 60 pawai budaya. Salah satunya adalah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. (dwi/adv).



Penampilan dari RSUD Bontang saat mengikuti BCC 2023. (Dwi S)

RSUD Taman Husada Meriahkan BCC 2023, Tampilkan Slogan Inovasi Pelayanan Digital

BONTANG - RSUD Taman Husada ikut menyemarakan Event Bontang City Carnival (BCC) 2023, Sabtu (21/10/2023) di Simpang 3 Lampu Merah Ramayana.

Kepala Bagian Hukum, Kehumasan, dan Kerjasama, Syariful Rahma mengatakan, RSUD Bontang menampilkan Indonesia Raya dalam artian beragam suku dan budaya.

"Ada beberapa dari kami (RSUD) yang ikut dan turun langsung untuk mengikuti BCC, ada sebanyak kurang lebih 40 orang," ucapnya.

Dalam BCC ini, RSUD Bontang juga menampilkan beberapa slogan terkait inovasi pelayanan digital, seperti Sistem Pendaftaran Berbasis Android (Si PERBAN), Sistem Pendaftaran Online (Si PENTOL),

Sistem Pendaftaran Mandiri (Si PERI) serta Elektronik Medical Record (EMR).

"Kami hadir dengan beragam suku dan budaya, namun kami juga berusaha selalu memberikan pelayanan yang setara. RSUD Taman Husada Bontang siap melayani sepenuh hari," paparnya.

Rahma menambahkan, pihaknya juga menjunjung tata nilai CERIA. C artinya cepat, yang berarti segera dalam memberikan pelayanan. E artinya efisien, hemat waktu, dan biaya serta optimal. R artinya ramah, berkata halus, tersenyum, salam dan sapa. I artinya inovatif, melakukan cara baru untuk menyelesaikan kegiatan dan selalu menambah ilmu, serta A artinya aman, bekerja, hati-hati dan sesuai Standar dan Prosedur Operasional (SPO). (dwi/adv)



DPMPTSP Kota Bontang saat berkontribusi di BCC 2023. (Syakurah/Radarbontang)

DPMPTSP Semarakkan BCC 2023, Tampilkan Pakaian Daur Ulang Sampah Plastik

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) turut meramaikan Bontang City Carnival (BCC) 2023, Sabtu (21/10/23) di Simpang Tiga Ramayana.

DPMPTSP menggarap tema daur ulang sampah plastik sebagai bagian dari promosi investasi sektor plastik. Sampah plastik tersebut kemudian dibuat menjadi rompi, udeng, topi, dan rok yang dikenakan para pegawai sebagai kostum.

"Tema ini dipilih karena ada potensi investasi bisa dilaksanakan dari bahan plastik daur ulang," kata Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim.

Asdar mengatakan, BCC tahun ini lebih semarak

karena ada dua jenis kegiatan yaitu defile carnival dan pawai budaya, sehingga peserta yang dilibatkan juga cukup banyak.

Adapun harapannya dengan BCC kali ini, agar Kota Bontang semakin terkenal dijang nasional dan internasional sekaligus menjadi kota ramah investasi dari berbagai sektor terutama investasi sektor pariwisata dan investasi sektor UMKM.

"Suatu kebanggaan Kota Bontang dapat terus menyelenggarakan BCC, ini merupakan kegiatan yang harus terus dilaksanakan agar makin banyak warga luar daerah yang datang ke Bontang," tutupnya. (sya/adv)



BKPSDM Kolaborasi BCC Bersama Paguyuban Bojonegoro, Angkat Core Value ASN BerAKHLAK Pada Nilai-nilai Budaya Bojonegoro

BONTANG - Pawai budaya kolaborasi BKPSDM Kota Bontang dan Paguyuban Bojonegoro Kota Bontang turut memeriahkan Bontang City Carnival (BCC) Tahun 2023 sebagai rangkaian memperingati Hari Ulang tahun ke 24 Kota Bontang.

Dalam pawai budaya kolaborasi ini, seluruh performance yang ditampilkan Paguyuban Bojonegoro menggambarkan nilai-nilai ASN Berakhlak sebagai pondasi dalam membangun budaya kerja ASN yang profesional di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

TARI TENGUL

Merupakan tari penyambutan atau tari selamat datang di daerah Bojonegoro, dimana tari ini dikolaborasi dari seni wayang TENGUL yg merupakan bagian dari wayang tiga dimensi di pulau Jawa. SENI TARI ini menggambarkan salah satu nilai ASN berakhlak, yakni: ASN yang Berorientasi pelayanan. Yang dengan senyum, salam, sapa dan sopan santun senantiasa menyambut masyarakat dalam setiap layanan yang diberikan.

KAYANGAN API

Adalah sumber api alam abadi yg terletak di desa Sendangharjo kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro. Kayangan api diperkirakan telah berpijar sejak jaman kerajaan Majapahit, dalam hal ini kesetiaan, keteguhan nyala api kayangan ini merupakan personifikasi dari salah satu nilai ASN berakhlak, yakni: ASN yang loyal dan akuntabel. Yang komitmen dan kesetiannya terus menyala tidak lekang digerus jaman dan perubahan

NAGA BERGOLA

Adalah Naga jelmaan dewa yg merupakan sahabat dari Prabu Angling Darmo. Suatu ketika Naga

Bergola memberikan ilmu wasiat Ajian Senyawa. Dengan ilmu tersebut Prabu Angling Darmo bisa memiliki kemampuan mengetahui bahasa semua binatang dan menambah kearifan sebagai seorang Raja dlm memimpin rakyatnya. Kisah Naga Bergola dan Prabu Angling Darmo ini menggambarkan nilai ASN yang kompeten, yang memiliki keinginan secara terus menerus untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas dirinya.

SENI OKLIK

Adalah kesenian khas Bojonegoro, alat musik dari bambu ini tercipta berdasarkan latar belakang fenomena sejarah di masa lalu. Pada perkembangannya OKLIK bisa dikolaborasi dengan alat - alat musik yg lain seperti drum, keyboard maupun alat musik gamelan berbahan logam, yang menambah indahnaya nada dan irama yg dihasilkannya. Seni OKLIK ini mencitrakan nilai ASN yang Harmonis, kolaboratif, dan adaptif yang memiliki kecakapan untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Sebagai apresiasi atas keberhasilan Kota Bontang dalam membangun budaya kerja profesional melalui nilai-nilai ASN Berakhlak tersebut, pada Tahun 2023 ini Pemkot Bontang berhasil meraih 6 penghargaan tingkat nasional dan 5 penghargaan tingkat regional dalam manajemen ASN

Dengan semangat HUT Ke-24 Kota Bontang: Mari bersama Kita wujudkan internalisasi nilai-nilai ASN Berakhlak dengan layanan pegawai yang tanpa biaya, berbasis digital, profesional dan terus bergerak menuju Bontang yang Lebih Hebat. **(ADV)**



Tersangka OA (22) salah satu warga Kelurahan Guntung Bontang. (ist)

Ditangkap di Pinggir Jalan Pupuk Raya, Pria Asal Guntung Kedapatan Bawa Sabu 15,37 Gram

BONTANG - Tersangka OA (22) salah satu warga asal Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara berhasil ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Bontang, lantaran kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu, Jum'at (21/10/2023) kemarin.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Pratiya melalui Kasat Resnarkoba, Iptu Muhammad Yazid mengatakan, bahwa tersangka ditangkap di pinggir Jalan Pupuk Raya.

Waktu diberhentikan, tersangka OA sempat berusaha melarikan diri. Akan tetapi berhasil ditangkap. Beberapa saat kemudian, saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, pada bagian dashboard motor ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus pengharum ruangan yang berisi sabu seberat 15,37 gram.

"Tersangka ini mengakuinya dapat sabu dari seseorang, untuk saat ini masih kami selidiki," ucapnya.

Selain satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 15,37 gram, barang bukti lainnya adalah satu unit handphone merek Oppo, satu lembar bungkus pengharum ruangan, serta satu unit sepeda motor Honda Beat dengan plat KT 5850 QG.

Tersangka ini sudah berada di Mapolres Bontang. Tersangka pun dijerat dengan pasal 114 ayat 1 juncto pasal 132 ayat 1 atas pasal 112 ayat 1 juncto pasal 132 ayat 1 UU 35/2009 tentang Narkotika.

"Tersangka terancam maksimal 20 tahun penjara," pungkasnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



DAK KHUSUS PENDIDIKAN HARUS DIAWASI SERIUS



**MINTA TOKO TANI DIBUKA KEMBALI,
PENUHI KEBUTUHAN PETANI**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

DAK KHUSUS PENDIDIKAN HARUS DIAWASI SERIUS

TANJUNG REDEB - Anggaran yang disiapkan untuk sektor pendidikan mencapai 20 persen dari APBD. Namun, realisasinya dikeluarkan tak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, anggaran pendidikan termasuk dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu diawasi serius.

Dijelaskannya, anggaran pendidikan di Berau masih dibawah angka 20 persen. Hal tersebut yang memicu banyaknya infrastruktur dasar tidak tertangani maksimal. Sehingga, pihaknya akan menga-

wasi realisasi DAK secara serius.

“Ada DAK untuk bidang pendidikan tahun ini. Jumlahnya besar. Dengan melihat realisasi anggaran pendidikan yang sangat tidak maksimal, DAK itu juga harus diawasi. Biar tidak ada banyak masalah lagi di bidang pendidikan,” ungkapnya.

Diketahui, pada tahun 2024 ini Kabupaten Berau mendapat kucuran DAK sekisar Rp 219 miliar, yang terdiri dari DAK fisik dan DAL non fisik.

“Sehingga pengawasannya harus maksimal, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi,” tegas Peri. (adv/set)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

HARAP ADA PERDA UNTUK MENGAWASI DANA PENDIDIKAN

TANJUNG REDEB – Persentase anggaran senilai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai cukup besar.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait pengawasan penggunaan dana pendidikan. “Yang direalisasikan saat ini hanya satu persen saja. Tentu tidak masuk akal. Saya khawatir dunia pendidikan kita sulit maju jika tidak diberikan anggaran sebagaimana mestinya,” katanya.

Menurutnya, jika ada Perda terkait pengawasan penggunaan dana pendidikan, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengkritisi. “Jadi masyarakat tahu penggunaannya kemana saja. Kalau tidak sesuai, masyarakat bisa menuntut,” tegasnya.

Rudi menilai, minimnya penggunaan anggaran yang direalisasikan untuk sektor pendidikan merupakan suatu kegagalan visi-misi kepa-

la daerah. “Pemerintah saat ini saya katakan wanprestasi. Karena dari 18 visi misi yang di- gaungkan, salah satunya soal pendidikan, tapi kenyataannya tidak terbukti bisa lebih baik,” bebernya.

Dirinya menyebut, pendidikan seharusnya diutamakan. Terlebih dalam Undang-Undang termaktub sektor pendidikan harus diberi anggaran lebih. “Itu karena pendidikan suatu hal yang sangat penting. Apalagi menyangkut masa depan bangsa,” katanya.

Kendati demikian, Politikus PDI-P ini mengakui pihaknya di Komisi I DPRD Berau akan mengusulkan Perda tentang pengawasan penggunaan dana pendidikan. “Tujuannya supaya pendidikan di Berau sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, apalagi dengan persentase 20 persen. Tahun depan kami usulkan Perda mengenai hal tersebut,” pungkasnya. (adv/set)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

MINTA PERDA TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DIREVISI

TANJUNG REDEB – Masifnya peredaran minuman beralkohol (Minol) di seluruh hotel yang ada disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo. Dia menerangkan, pemerintah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 11 tahun 2010 tentang larangan peredaran minuman beralkohol.

Dirinya menuturkan, minuman beralkohol dengan Grade B hingga C yang kadar alkoholnya 5 sampai 55 persen hanya boleh beredar di hotel bintang 5. "Padahal di Berau tidak ada hotel bintang 5. Apalagi minol dengan Grade B dan C tidak bisa beredar sembarangan. Terlebih

yang Grade A harus diawasi perizinan dan takarannya," ungkapnya.

Faletinus menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus maksimal melakukan razia rutin. Jika mendapati minol dengan Grade B hingga C di botol yang ada, maka wajib ditertibkan. "Waktu itu kami sudah pernah mengusulkan bahwa Perda minol ini direvisi," bebernya.

"Karena ada dampak sanksi sosial kurang baik bagi pengedar dan pihak konsumsi. Karena secara aturan Perda, minuman alkohol grade B hingga C hanya boleh di hotel bintang 5," sambungnya. **(adv/set)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

MINTA TOKO TANI DIBUKA KEMBALI, PENUHI KEBUTUHAN PETANI

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina meminta agar Toko Tani yang berada di Jalan Murjani II, Kelurahan Karang Ambun segera dibuka kembali. “Padahal, beberapa waktu lalu Dinas Pangan sempat meresmikan Toko Tani itu,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mendorong Pemkab Berau melalui OPD terkait dapat mengupayakan agar Toko Tani tersebut dapat dibuka kembali.

Hadirnya Toko Tani itu bertujuan untuk menekan harga di lapangan. Sayangnya, hingga saat ini manfaat Toko Tani tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan adanya Toko Tani ini, harga menjadi sangat murah. Kemudian apa yang menjadi keluhan para petani seperti pupuk langka dan se-

bagainya bisa didapatkan,” ujarnya.

Politikus Golkar ini mengharapkan terobosan dari Pemkab Berau khususnya melalui Dinas Pangan ini dapat meringankan beban masyarakat dan petani di tengah mahalnya harga-harga barang pertanian di lapangan.

“Terobosan-terobosan seperti ini membuat para petani tidak lagi berkeluh kesah,” ucapnya.

Dirinya berharap, Toko Tani segera dibuka kembali agar bisa memenuhi kebutuhan para petani dengan harga yang lebih terjangkau.

“Termasuk pupuk, obat-obatan dan sebagainya. Kalau petani mudah untuk mendapatkannya, kan juga berkaitan dengan mendukung ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi pertanian,” pungkasnya. **(adv/set)**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

MINTA PEMERINTAH JELI GALI POTENSI PARIWISATA

TANJUNG REDEB – Langkah yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mengenai lomba desain dan tagline pariwisata Berau diapresiasi jajaran legislatif.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir menilai, adanya tagline untuk pariwisata Bumi Batiwakkal dapat memajukan destinasi wisata. "Jadi saya kira dengan adanya terobosan dari Disbudpar ini sudah baik. Sehingga pariwisata kita tidak jalan di tempat," katanya.

Dia mengungkapkan, sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang objek wisata harus terus dilakukan pembenahan. "Jika dibarengi

dengan keindahan alam yang kita miliki tentu menjadi nilai lebih," ujarnya.

Dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk terus menggali potensi-potensi pariwisata. "Jangan hanya Derawan, Maratua dan Bidukbiduk saja. Kita pasti masih memiliki ratusan potensi yang butuh sentuhan," tuturnya.

Politikus Golkar ini juga mengharapkan potensi-potensi wisata di perkotaan dikembangkan. Jangan terpaku di wilayah yang memang sudah banyak diketahui wisatawan. "Misalnya di Sungai Segah, itu bisa menjadi wisata susur sungai. Kita harus jeli melihat potensi yang ada," tandasnya. **(adv/set)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

MINTA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERFOKUS PADA USULAN DI MUSRENBANG

TANJUNG REDEB - Pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 mendatang diminta Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris berfokus pada usulan prioritas di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dikatakannya, pada tahun 2024 mendatang, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur sekisar Rp 2 triliun.

"Anggaran tersebut untuk menyelesaikan beberapa program pembangunan yang sudah berjalan," ungkapnya.

Maka dari itu, dirinya mendorong lanjutan pembangunan jalan penghubung Semanting-Kasai, yang rencananya akan dianggarkan sebesar Rp 20 miliar.

"Tapi sebaiknya dialihkan, karena di Musrenbang tidak jadi usulan prioritas. Lebih

baik fokus kepada yang prioritas, yaitu jalan poros utama menuju Semanting," katanya.

Disebutkannya, jalan poros Semanting perlu pembenahan karena untuk menunjang ekonomi masyarakat khususnya membuka akses pariwisata mangrove di Semanting.

"Seingat saya, Bupati Berau sudah dua kali pidato tentang wisata mangrove di Semanting. Tapi kalau jalanya tidak diperbaiki itu percuma," ujarnya.

Karena itu, dirinya bersama jajaran Komisi III DPRD Berau Maka kami dari meminta agar anggaran untuk jalan Kasai-Semanting dialihkan untuk pembenahan Poros Semanting.

"Ini untuk mendukung pengembangan ekonomi dan akses wisata di Semanting," pungkasnya. **(adv/set)**



GELAR PATROLI BLUE LIGHT, POLISI BUBARKAN KERUMUNAN PESEPEDA MOTOR



**MASYARAKAT MUSLIM BALIKPAPAN
SAMPAIKAN PERNYATAAN SIKAP
SOAL PALESTINA**



: Personel Satlantas Polresta Balikpapan melakukan teguran kepada pengendara sepeda motor yang berkumpul.

GELAR PATROLI BLUE LIGHT, POLISI BUBARKAN KERUMUNAN PESEPEDA MOTOR

BALIKPAPAN - Jajaran Satlantas Polresta Balikpapan pada Sabtu (21/10/2023) malam hingga Minggu (22/10/2023) dini hari tadi melakukan Patroli Blue Light di sejumlah titik jalan raya yang sering digunakan untuk aksi balap liar oleh para remaja di Kota Balikpapan.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kopol Ropiyani melalui Kanit Gakkum Satlantas Polresta Balikpapan, Ipda Danang Suparman mengatakan, patroli ini dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan Polresta Balikpapan. Patroli ini sebagai langkah dari keluhan masyarakat dan pengendara jalan yang terganggu dengan adanya aksi balap liar pada tengah malam hingga dini hari.

"Kita melakukan Patroli Blue Light ini untuk mencegah aksi balap liar. Selama ini masyarakat banyak yang mengadu ke kita terkait aksi ini," ujarnya.

Lebih lanjut Danang menjelaskan, Patroli Blue Light ini mendatangi sejumlah lokasi yang diduga digunakan sebagai balap liar. Jika ditemukan adanya kerumunan pesepeda motor, maka pihaknya langsung menegur hingga meminta untuk membubarkan diri.

"Ada beberapa kelompok yang kita tegur dan minta untuk membubarkan diri. Kita di sini untuk mencegah aksi balap liar itu terjadi," jelasnya.

Tidak hanya menegur dan meminta membubarkan diri, pihak-

nya juga melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara sepeda motor terkait kelengkapan berkendara.

"Kita juga periksa SIM dan STNK-nya. Tapi Alhamdulillah ini malam kami menemukan semua pengendara tertib dan surat-suratnya lengkap," tambah Danang.

Danang memastikan Patroli Blue Light ini akan terus dilakukan di titik-titik jalan yang diduga sering digunakan untuk aksi balap liar. Adapun titiknya di antaranya, di kawasan Balikpapan Baru, Grand City, Sepinggian depan Bandara SAMS Balikpapan, Melawai hingga Jalan Jendral Sudirman.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasarit



Aksi damai Masyarakat Muslim Balikpapan perihal Bebasan Palestina dari Penjajahan Zionis Yahudi, di pertigaan Plaza Balikpapan, Sabtu (21/10).

MASYARAKAT MUSLIM BALIKPAPAN SAMPAIKAN PERNYATAAN SIKAP SOAL PALESTINA

BALIKPAPAN - Puluhan masyarakat muslim di Kota Balikpapan menggelar aksi damai dengan menyampaikan sejumlah pernyataannya perihal apa yang terjadi pada rakyat Palestina saat ini. Aksi ini berlangsung di pertigaan Plaza Balikpapan pada Sabtu (21/10/2023) sekitar pukul 16.45 Wita.

Ketua LBH Pembela Islam Terpercaya (PELITA), Abdul Rais mengatakan, bahwa masyarakat muslim Kota Balikpapan sangat mengecam tindakan biadab Israel dan mengecam pemimpin-pemimpin negara muslim yang tidak memiliki keberanian mengirimkan segala daya upaya untuk membantu rakyat Palestina, termasuk keberanian mengirimkan militer.

"Bahwa yang terjadi bukanlah konflik, melainkan penjajahan zionis yahudi terhadap rakyat Palestina dengan cara mengambil, merampok dan menggusur tanah air serta mengusir rakyat Palestina," ujarnya.

Lebih lanjut Abdul Rais menjelaskan, solusi dua negara, Israel dan Palestina sangat tidak layak digaungkan. Hanya orang yang berputus asa dan tidak memiliki keberanian yang rela hidup berdampingan dengan penjajah.

"Penjajahan zionis Yahudi bermula pasca melemah dan runtuhnya Khilafah Ustmani atau Ottoman Turki. Penjajahan dimulai dari peristiwa Perjanjian Sykes-Picot pada 1916 antara Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis membagi peninggalan Khilafah Utsmaniyah atau Ottoman Turki di wilayah Arab. Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Perancis mendapat wilayah jajahan Suriah, Lebanon, Afrika, Mesir, Ethiopia, Libiya dan lain-lain, sedangkan Inggris

memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara itu, Palestina khususnya old city dijadikan status wilayahnya sebagai wilayah internasional," jelasnya.

Rais juga menyebut jika pada tahun 1917 Pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri, Arthur Balfour mengirimkan surat kepada pemimpin Yahudi Inggris, Lord Rotschild bahwa Pemerintah Inggris menyerahkan Palestina kepada mereka.

Atas kejadian tersebut masyarakat muslim Balikpapan akan mengirimkan surat laporan kepada ICC (International Criminal Court) dan ICJ (International Court of Justice) mendesak untuk mengadili dan memberikan putusan, yaitu Israel dan pemimpinnya dinyatakan sebagai pelaku kejahatan perang. Dan meminta untuk membatalkan Perjanjian Sykes-Picot dan deklarasi Balfour dikarenakan bertentangan dengan hukum internasional dan menyatakan Israel tidak sah sebagai negara berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 5 Putusan (Resolusi) 1514 (XV) dalam sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa PBB.

"Untuk menyerahkan segala kekuasaan kepada bangsa penduduk asli dari wilayah-wilayah jajahan itu, dengan tidak bersyarat apa-apapun, menuruti kemauan dan kehendak mereka itu sendiri yang dinyatakan dengan bebas, dengan tiada memandang perbedaan bangsa, agama atau warna kulit mereka, supaya mereka dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan yang sempurna," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

OIKN BERI PEMBEKALAN PENGELOLA HOMESTAY DI SEKITAR IKN TENTANG KUALITAS PELAYANAN HOTEL

BALIKPAPAN – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas) Otorita IKN membekali pengetahuan tentang pengelolaan homestay atau penginapan kepada warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kelayakan homestay atau penginapan, OIKN pun menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim dan Politeknik Negeri Balikpapan jurusan perhotelan untuk melaksanakan Workshop Pelayanan Tamu bagi pengelola homestay, penginapan dan hotel atau sejenisnya di wilayah delin-easi IKN, Sabtu (21/10/2023) hingga Senin (23/10/2023) di Hotel Horison Ultima Bandara Balikpapan.

Deputi Sosbudpemas Otorita IKN, Alimuddin mengatakan, kegiatan ini salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Otorita IKN kepada warga di wilayah IKN dan selama ini menjadi pelaku usaha penginapan, homestay, hotel dan sejenisnya.

Di mana wilayah IKN makin banyak orang akan datang, sehingga kepariwisataan di sekitar IKN pun harus siap agar dilirik oleh para tamu, salah satunya fasilitas homestay atau penginapan harus memiliki pelayanan yang baik.

"Kepariwisataan adalah bisnis kebahagiaan. Kalau tamu yang datang bahagia, dia akan dengan mudah mengeluarkan uang untuk belanja. Juga menambah waktu tinggal," ujarnya.

Alimuddin menjelaskan, di Kaltim tingkat kunjungan sebenarnya masih termasuk rendah. Karena kebanyakan dari orang-orang ini tidak datang lebih dari dua hari atau bahkan tak sampai dua hari, hal ini karena ada beberapa persoalan.

"Pengelola mesti bisa mem-



Pengelola atau pemilik homestay atau penginapan diberi pengetahuan perihal housekeeping hotel berbintang.

beri pelayanan, fasilitas, bahkan senyum sebaik-baiknya. Kita saja ketika menginap di hotel jika sarapannya tidak enak, tidak nyaman, besoknya tidak ingin menginap di situ lagi," jelasnya.

Selain itu pengelolaan juga perlu memahami para tamu ini, untuk diberikan kebahagiaan maka yang juga diperlukan adalah keterampilan melayani para tamu ini.

"Maka ini yang harus dipahami bisnis perhotelan. Para pemilik penginapan akan diberikan bekal oleh orang-orang yang ahli agar pelayanan yang diberikan bagi para tamu adalah yang terbaik," tambahnya.

Nantinya jika fungsi Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) telah berfungsi melaksanakan tugas dan fungsinya, maka bakal banyak orang yang berkunjung ke IKN. Saat ini memang masih dirasakan oleh Balikpapan, tetapi kelak itu juga akan terjadi di IKN.

"Sehingga kita berharap, pengelola atau pemilik homestay di IKN sudah siap menerima orang-orang yang berkunjung. Kita harus bisa mengarahkan mereka menginap di IKN," tegas Alimuddin.

Untuk diketahui, di wilayah IKN bakal berdiri beberapa hotel berbintang antara lain, Hotel Vasanta, Hotel Nusantara, Hotel Jambu Luwuk, Hotel Pakuwon dan lain-lain. Tetapi para pelaku usaha penginapan ini tidak perlu khawa-

tir karena mereka memiliki pangsa pasar tersendiri.

Pada kesempatan itu, Ketua PHRI Kaltim, Sahmal Rukip mengungkapkan, para pelaku usaha perhotelan harus memiliki kemandirian pola pikir, tingkah laku dan lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal.

"Perlu ada pemikiran agar mereka tidak kaget. Karena daerah mereka yang tadinya tidak seramai ini, sekarang banyak pengunjung. Antusiasme mereka mengikuti pelatihan semacam ini adalah langkah awal yang lebih baik," ujarnya.

Sahmal membeberkan, saat ini di Kaltim ada hampir 200 hotel bintang maupun non bintang dan 350 restoran. Ini, menurutnya cukup luar biasa untuk mengatasi pelayanan bagi tamu-tamu yang datang ke Kaltim.

"Saat ini memang Balikpapan siap untuk mem-back up PPU," tambahnya.

Untuk daerah sekitar IKN, yakni PPU memang memerlukan peningkatan di beberapa hal. Sehingga akan dilakukan uji kompetensi dan sertifikat kelayakan di semua bidang. Perlu penyempurnaan di bidang-bidang seperti housekeeping, HRD, dan lainnya.

"Nanti terus dikembangkan dan kami PHRI siap membantu," tegas Sahmal.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI SENIN
23 OKT 2023



BINCANG ANAK MUDA MELEK POLITIK DI PASER, TINGKATKAN PERAN DAN KESADARAN GEN Z

**PPRL BUKA TAJAK SUMUR BARU,
BUPATI PASER TUNTUT DAMPAK
SIGNIFIKAN KEMAJUAN DAERAH**





Para pengisi acara di "Anak Muda Melek Politik, Siapa Takut?"

BINCANG ANAK MUDA MELEK POLITIK DI PASER, TINGKATKAN PERAN DAN KESADARAN GEN Z

PASER - Peran dan kesadaran politik masyarakat lintas usia, khususnya kategori Gen Z atau usia 26 tahun ke bawah di Kabupaten Paser perlu diberikan pemahaman dalam menyambut kontestasi perpolitikan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Pasalnya, peran Gen Z pada pesta demokrasi 5 tahunan nanti, dipastikan turut jadi penentu kualitas politik. Hal itu jadi perbincangan dalam acara Talk Show bertajuk "Anak Muda Melek Politik, Siapa Takut?" di Bloom Cafe & Garden, Jumat (20/10/2023) malam.

Perbincangan yang diinisiasi oleh anak-anak muda dan turut dihadiri, serta diisi oleh anak muda itu sendiri, sebagai langkah awal guna mendorong kepedulian anak muda terhadap politik, salah satunya mendukung sesama anak muda untuk terjun ke politik.

"Kondisi saat ini, anak muda terkesan apatis terhadap politik. Padahal milenial dan gen z dari hasil survey menguasai separuh lebih dari penduduk Indonesia atau 56 persen suara sebagai pemilih," kata Akademisi, Furaidi Safitiri.

Ia menyayangkan, dari tingginya jumlah pemilih dari kedua

kategori itu, tidak sebanding dengan tingkat partisipasi politik berdasarkan hasil survey. Hal ini diindikasikan oleh pemikiran yang terbuka, cakap dalam memanfaatkan teknologi dan kelebihan informasi.

"Hal itulah yang mungkin menjadikan mereka malas terlibat didalam politik itu sendiri," jelasnya.

Menurutnya, cara pandang anak muda terhadap politik memang perlu diubah. "Kalau tidak punya keterampilan dan kebijakan tidak diciptakan oleh politisi maka siap-siap jadi pengangguran, sehingga anak muda harus berkontribusi terhadap politik," katanya.

Politisi Milenial, Zulfikar Yuliskatin, mengatakan, para anak muda perlu paham dan mengerti apa arti dari politik. Sederhananya secara umum politik menyangkut terhadap kehidupan, baik di lingkungan sosial maupun dalam hal mencapai tujuan pribadi.

"Di tingkat pendidikan harus membahas tentang politik, karena di keseharian kita tak lepas dari adanya proses politik," kata Zulfikar.

Baginya, politik tidak serta merta selalu dikaitkan dengan Partai Politik (Parpol). Dengan begitu Gen Z perlu jeli dalam me-

mahami politik. Perspektif terhadap politik perlu diubah, jika hanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik.

Sementara itu, Seniman, Sri Ayu Mulyati menyampaikan, agar kesadaran dan peduli terhadap politik sangat perlu bagi kemajuan daerah. Namun, keputusan politik terhadap praktik yang kurang baik seperti money politik atau suap, kembali ke pribadi masing-masing.

"Tidak dapat dimungkiri keterlibatan uang dalam politik cukup utama. Tapi jika uang digunakan untuk membeli suara, maka itu kita lagi kepada kita sebagai pemilih. Jika dari politik yang menghindari money politic, maka dari kita lah," katanya.

Disisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi menyatakan, salah satu cara agar anak muda paham tentang politik yakni terjun ke parpol. Tentunya dengan cara itu sebagai salah satu aspek yang menyadarkan anak muda pentingnya berpolitik.

"Jika ingin lebih tahu silakan masuk partai. Di situ banyak pelajaran hingga tujuan dan manfaat berpolitik," katanya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Lokasi tajak sumur kinanti di Kecamatan Paser Belengkong

PPRL BUKA TAJAK SUMUR BARU, BUPATI PASER TUNTUT DAMPAK SIGNIFIKAN KEMAJUAN DAERAH

PASER - Pasir Petroleum Resources Limited (PPRL) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang mineral dan gas bumi (migas) Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di bawah naungan SKK Migas kembali membuka tajak sumur baru.

Hal ini turut disambut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam mendukung eksplorasi yang dilakukan. Bupati Paser, Fahmi Fadli menyatakan, tajak sumur kelima ini diharapkan berdampak pada ketahanan energi yang ada di daerah.

"Galian minyak sudah sepatutnya dapat menjadi sumber ketahanan energi bagi keberlangsungan dan ketersediaan energi," kata Fahmi.

Dengan adanya tajak sumur kinanti kelima tersebut, menuet Fahmi, PPRL telah menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan produksi minyak yang berlokasi di Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong itu.

"Sehingga dapat membantu SKK Migas bersama pemerintah mencapai target untuk memenuhi kebutuhan energi skala nasional," tambahnya.

Fahmi mengharapkan, dengan bertambahnya tajak sumur produksi PPRL dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah untuk mewujudkan visi dan

misi Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (MAS).

Hal itu selaras dengan maksud dan tujuan kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting, atau pertemuan eksekutif hilirisasi minyak dan gas bumi wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang berlangsung pekan lalu di Yogyakarta.

"Pertemuan yang mengangkat tema sinergi industri hulu migas bersama Pemda dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, telah membuka wawasan kita tentang pentingnya peran industri migas dalam mendukung pembangunan di daerah," ulasnya.

Keberadaan PPRL, juga diharapkan bisa mendukung serta menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Bukan hanya dalam bentuk CSR, namun juga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat khususnya di Pasir Belengkong," imbuhnya.

Selain itu, dengan adanya aktivitas eksplorasi PPRL dinilai akan membuka peluang pengembangan sektor pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan perekonomian. "Semoga produksinya terus meningkat, lancar dan mampu menghasilkan minyak terbaik," tandasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



DPRD Paser kunjungi Hulu Sungai Utara

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH, KOMISI I DPRD PASER KUNJUNGI DPRD HULU SUNGAI UTARA

PASER - Sejumlah Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kunjungan kerja itu dalam rangka sharing ilmu mengenai optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Salah satu anggota Komisi I DPRD Paser yang ikut dalam kunjungan tersebut Sutarno menyampaikan, pengelolaan aset daerah yang profesional dan optimal dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

“Saat ini pengelolaan aset dengan melibatkan pihak ketiga merupakan salah satu pilihan yang banyak diterapkan, pola kerjasama atau penyewaan aset-aset yang menganggur menjadi salah satu alternatif pilihan pengelolaan aset yang dapat diterapkan,” terang Sutarno.

Dijelaskan, optimalisasi pengelolaan aset daerah mesti dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. “Kunjungan kami ke DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, guna mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset pemerintahnya,” tambahnya.

Sutarno menilai, tujuan utama dalam pengelolaan aset pemerintah digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi daerah dan tidak untuk kepentingan pribadi. Kunjungan kerja Komisi I DPRD Paser, juga bertujuan mengulas informasi upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam mengelola aset daerah yang menganggur.

“Kami ingin tahu soal itu bagi aset daerah

yang menganggur, sehingga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Raiza Kutfi mengatakan pada dasarnya semua daerah akan melakukan langkah yang hampir sama lantaran harus mengikuti aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan.

“Barang milik daerah, merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” terang Raiza didampingi Kabang Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ahmad Fahri.

Pengelolaan aset daerah, dinilai harus ditangani dengan baik agar dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan serta pertimbangan kemampuan keuangan.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah, juga harus didasari dengan pengelolaan yang baik agar yang dicatat menjadi bahan pertimbangan.

“Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah juga harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran yang didasari pedoman peraturan yang berlaku agar barang milik daerah terakomodir sesuai capaian,” tutup Raiza.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari